BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingginya angka pengangguran di kalangan usia produktif, khususnya pada kelompok umur 15-29 tahun, merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh wilayah desa. Fenomena tingginya angka Pengangguran Terbuka ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan pasar kerja dengan keterampilan serta peluang yang tersedia di desa. Hal ini semakin diperparah oleh keterbatasan lapangan kerja formal yang ada, serta akses pendidikan dan pelatihan yang belum memadai untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda di desa (Harjati, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya pemanfaatan potensi tenaga kerja produktif yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat desa, sehingga berdampak langsung pada tingginya tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan perhatian serius dalam upaya pengembangan desa dan peningkatan kemandirian ekonomi, agar potensi sumber daya manusia di desa dapat dioptimalkan secara maksimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah secara aktif melakukan berbagai upaya dalam pengembangan desa dan peningkatan kemandirian ekonomi desa melalui kebijakan, program, dan pendampingan yang terstruktur. Salah satu langkah strategis adalah pengucuran Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana dana tersebut diprioritaskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur,

pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas desa secara swakelola dengan memanfaatkan sumber daya lokal (Epa & Ra'is, 2019).

Gambar 1. 1 Grafik Perbandingan Rerata TPT Provinsi Jawa Timur dan TPT Kabupaten Sidoarjo

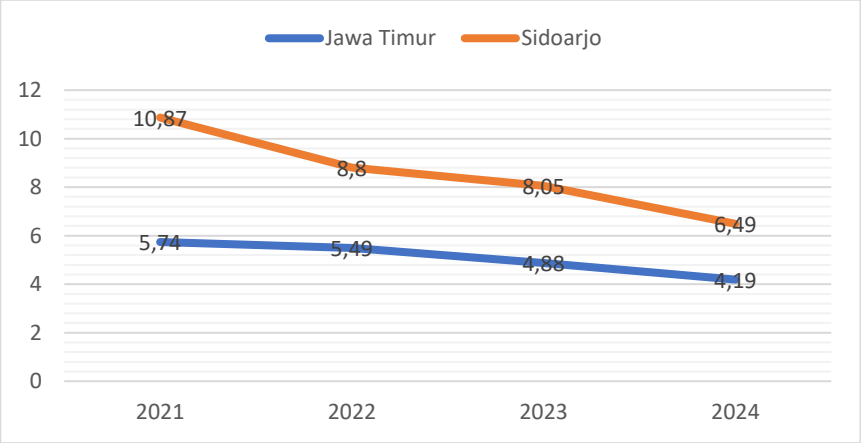

Sumber: Badan Pusat Statistik

Desa memiliki peran fundamental sebagai pondasi dalam membangun kemandirian suatu daerah, karena desa merupakan unit wilayah terkecil yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan pengelolaan potensi lokal. Dengan diberikannya otonomi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah yang mengatur penyelenggaran pemerintahan dengan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayan, dan peran serta masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren merupakan landasan otonomi daerah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan (Fauziah. et al, 2016). Pemberdayaan masyarakat desa menjadi kunci utama, sebab partisipasi aktif warga dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan akan mendorong opotimalisasi pemenafaatan sumber

daya, meningkatkan ekonomi lokal, serta memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Otonomi Desa, pemerintah mendorong desa untuk membentuk organisasi bisnis atau Lembaga usaha ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa, terutama kebutuhan dasar dan pemanfaatan sumber daya pedesaan yang belum maksimal, serta mengembangkan sumber daya manusia yang bekompeten dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi desa tersebut.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berperan sebagai badan usaha ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa karena mampu mengelola potensi dan sumber daya lokal secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Melalui BUMDes, desa dapat menyediakan layanan umum, memanfaatkan asset desa, serta mendukung usaha produksi masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. BUMDes juga membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dengan mengembangkan berbagai usaha produktif yang sesuai dengan kebutuhan desa. Selain itu, BUMDes mengedepankan prinsip bisnis yang berakar pada budaya lokal dan memberdayakan masyarakat secara partisipatif, sehingga memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di tingkat desa.

Menurut Sudarmanto dan Permadhi (2020), tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi, sekaligus memperluas akses warga desa terhadap kesempatan kerja dan peluang usaha. Pentingnya Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai instrument

penguatan pembangunan ekonomi di desa, sehingga pendirian BUMDes di setiap desa disesuaikan dengan kapasitas ekonomi dan karakteristik lokal masing-masing, sehingga jenis usaha yang dikembangkan berbeda-beda, seperti pengelolaan desa wisata, kegiatan simpan pinjam, pasar desa, pengembangan produk kerajinan masyarakat, atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilaksanakan melalui unit-unit usaha didalamnya, dimana kegiatan-kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dibuat dan diatur oleh peraturan desa. Dengan adanya unit usaha ini, meskipun beberapa warga masih dalam kondisi pengangguran, mereka tetap masuk dalam kategori pengangguran aktif karena terlibat dalam berbagai aktivitas usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini sejalan dengan peran Bumdes yang tidak hanya meningkatkan perekonomian desa, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui penciptaan peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan (Darwita, 2019).

Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, secara konsisten berusaha membangun dan mengembaingkan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong setiap desa untuk memiliki BUMDes yang menjadi pondasi bagi peningkatan potensi desa (Maulidiah & Megawati, 2022). BUMDes di Kabupaten Sidoarjo memiliki 3 kategori yaitu kategori BUMDes maju, berkembang, dan pemula. Klasifikasi BUMDes ini berdasarkan pada data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Kabupaten Sidoarjo. Setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa bisa melakukan pendaftaran dan memasukkan data secara mandiri melalui situs web Data Desa Center yang dikelolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, hal tersebut dikarenakan datadesacenter.id dibuat untuk melaksanakan pemetaan (mapping), pemantauan, pembimbingan, evaluasi, dan pelaporan terhadap badan usaha milik desa di bidang hukum/legalitas, sumberdaya manusia, pengembangan usaha, tata kelola kelembagaan, tata kelola administrasi keuangan, dan teknologi secara berkelanjutan bagi seluruh BUMDes di Jawa Timur.

Kategori klasifikasi BUMDes di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada data yang telah diperbarui secara mandiri oleh pengelola BUMDes, sehingga prosesnya berjalan otomatis sesuai dengan masing-masing kategori, yaitu maju, berkembang, dan pemula. BUMDes dikategorikan sebagai maju jika sudah memenuhi syarat kesesuaian usaha, memiliki peraturan dari desa, mendapat penyertaan modal, dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Untuk kategori berkembang, BUMDes belum mampu memberikan kontribusi yang optimal pada pendapatan asli desa. Sedangkan BUMDes pemula adalah yang sudah memiliki peraturan desa dan modal, tetapi belum mulai beroperasi atau menjalankan usahanya (Rakhmadian & Arif, 2023).

Tabel 1. 1 Klasifikasi BUMDes di Sidoarjo dan Jawa Timur

No	Klasifikasi	Jumlah BUMDes di Kabupaten Sidoarjo	Jumlah BUMDes di Jawa Timur
1	Maju	118	2.225
2	Berkembang	106	2.984
3	Pemula	50	1.544
TOTAL		274	6.753

Sumber: Kemendesa (2024)

Jumlah BUMDes di Sidoarjo dan Jawa Timur ditampilkan per kategori dalam tabel. Dari 274 BUMDes yang dipublikasikan di situs wes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, 118 di Sidoarjo tergolong maju. Berdasarkan data ini, sulit untuk menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran karena BUMDes memiliki sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah agar pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dapat terlaksana. Dibutuhkan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi hambatan dalam pemecahan permasalahan jumlah pengangguran di usia produktif yang tinggi pada desa, terutama pada desa dengan BUMDes yang masuk kategori maju.

Menurut Soeharto (2005), serangkaian inisiatif yang dikenal sebagai "pemberdayaan masyarakat" dimaksudkan untuk mendukung segmen masyarakat yang lebih lemah, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan. Sedangkan menurut Mardikanto (2012), pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan derajat dan martabat kelompok masyarakat yang saat ini masih terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan berarti memberikan kemampuan dan kemandirian kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai pihak sering kali lebih difokuskan pada aspek ekonomi sebagai upaya untuk mengentaskan atau mengurangi kemiskinan. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generation*). Upaya pemberdayaan masyarakat memiliki terdiri dari 4 lingkup pokok yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan (Mardikanto & Soebiato, 2012).

Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan potensi desa melalui BUMDes, Kecamatan Krian merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 22 desa. Terdapat 17 BUMDes pada Kecamatan Krian yang sudah terdata di *website* datadesacenter.id Provinsi Jawa Timur dan sudah tersortir kedalam kategori BUMDes yaitu pemula, berkembang, dan maju. Salah satu BUMDes yang masuk ke dalam kategori maju di Kecamatan Krian adalah BUMDes Mitra Usaha yang berada di Desa Sidorejo.

Tabel 1. 2 Klasifikasi BUMDes Kategori Maju, Berkembang, dan Pemula di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

No	Nama BUMDes	Tahun Berdiri	Nama Desa	Alamat	Klasifikasi
1	Ajeg Makmur	2016	Jeruk Gamping	Jalan KH. Thohir Sholeh No. 148 Jerukgamping	MAJU
2	Bumiasih	2022	Tropodo	Jl. Lapangan Tropodo No. 20, Ds. Tropodo	MAJU
3	BUMDes Sejahtera	2016	Sidomulyo	Jl. Gubernur Soenandar P.S 1/6	MAJU
4	Djatikusumo	2016	Sedengah Mijen	Jl. Raya Sedenganmijen No.1 Krian	MAJU
5	Empatlima	2019	Barengkrajan	Jl. Sidorono Nomor 09 Desa Barengkrajan	MAJU
6	Mitra Usaha	2017	Sidorejo	Jalan Raya Sidorejo Nomor 1	MAJU
7	Sumber Terik Jaya Raya	2018	Terik	Jl. KH. Abdul Ghofarnadi No.01 Desa Terik	MAJU
8	Makmur Jaya	2016	Sidomojo	Pasar Desa Sidomojo No.7, Desa Sidomojo	MAJU
9	Sumber Arto	2017	Terung Kulon	Desa Terungkulon kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	MAJU
10	Jati Sejahtera	2016	Jatikalang	Balai Desa jatikalang	MAJU

No	Nama BUMDes	Tahun Berdiri	Nama Desa	Alamat	Klasifikasi
11	Sejahtera Ponokawan	2017	Ponokawan	Jl. Raya Ponokawan, No. 1, Desa Ponokawan	MAJU
12	Sido Joyo	2022	Watugolong	Jl. Kyai Mojo No.1, Desa Watugolong	MAJU
13	Mandiri Sejahtera	2017	Terung Wetan	Terungwetan RT 03 RW 01	BERKEMBANG
14	Keboharan Mandiri	2016	Keboharan	Jl. Balai Desa Keboharan No. 10	BERKEMBANG
15	Jenggolo Manik	2019	Kraton	Jl. Raya Kraton No.01 Desa Kraton	BERKEMBANG
16	BUMDes Gamping	2015	Gamping	-	BERKEMBANG
17	Berkah Jaya Abadi	2020	Katrungan	Balai Desa Katerungan	PEMULA

Sumber: Kemendesa (2025)

Berdasarkan data diatas, BUMDes Mitra Usaha merupakan BUMDes yang termasuk dalam kategori maju, dengan kata lain BUMDes Mitra Usaha telah berperan aktif dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sidorejo dan sudah memenuhi syarat kelayakan usaha, memiliki peraturan desa, dan mendapat penyertaan modal. BUMDes Mitra Usaha berlokasi di Jalan Raya Sidorejo No 1 dan memiliki beberapa unit usaha yang terletak di berbagai bagian di Desa Sidorejo. Unit-unit usaha yang telah dijalankan BUMDes Mitra Usaha semakin waktu berjalan semakin berkembang, selaras dengan pendapatan BUMDes yang didapat dari operasional unit usaha tersebut.

> **duta.co** – “Hari ini kita lantik, kita ambil sumpah pelaksana operasional, penasehat, pengawas BUMDes. Ini mitra kerja Pemerintahan Desa. Kami sambut ajakan Bu Gubernur untuk menjadi Desa Mandiri. Kami yakin, dengan *squad* (pasukan) baru ini, BUMDes Sidorejo bisa bergerak cepat” demikian Hery Sucipto Achmadi S.T, Kepala Desa Sidorejo saat melantik tim baru BUMDes, Senin (19/12/2022). Sumber: https://duta.co/sambut-ajakan-gubernur-desa-sidorejo-siap-mandiri-a-fauzi-genjot-bumdes-dongkrak-potensi-ekonomi diakses pada 13 Juni 2025.

Pendirian BUMDes Mitra Usaha mengacu pada Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sidorejo. BUMDes Mitra Usaha sudah berdiri sejak tahun 2017, namun masih belum ada pembentukan unit usaha atau kegiatan usaha yang dijalankan sampai pada tahun 2022 akhir. Hal itu disebabkan oleh serah terima kepengurusan baru dilantik pada tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya anggota BUMDes melakukan penggalian potensi desa untuk merencanakan unit-unit usaha yang dapat berpotensi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat desa. Setelah penggalian potensi yang dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan tersebut, pengurus BUMDes Mitra Usaha membuat peta konsep yang menitik beratkan pada sumber daya manusia dan alam yang berfungsi sebagai elemen penting yang mendukung dalam memilih jenis unit usaha yang akan dijalankan.

Tabel 1. 3 Pendapatan BUMDes Mitra Usaha per 23 Desember 2024

Tahun	Pemasukan BUMDes Mitra Usaha	Laba BUMDes Mitra Usaha
2022	-	-
2023	Rp 141.600.000,00	Rp 14.335.000,00
2024	Rp 59.284.000,00	Rp 6.181.500,00

Sumber: Laporan Keuangan BUMDes Mitra Usaha 2024

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, BUMDes Mitra Usaha baru memiliki pemasukan pendapatan pada tahun 2023 dengan pemasukan sebesar Rp 14.335.000. Penyertaan modal juga baru didapat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mitra Usaha pada tahun 2023 sejumlah Rp 30.000.000,00 sehingga penggalian potensi yang dilakukan setelah pembentukan struktur anggota dapat berjalan dengan lancar. Pada tahun selanjutnya di tahun 2024 BUMDes Mitra Usaha tidak mendapatkan penyertaan modal seperti sebelumnya, dengan

pendapatan BUMDes Mitra Usaha mencapai angka Rp 59.284.000,00 dan laba mencapai angka Rp 6.181.500,00 yang membuktikan bahwa BUMDes Mitra Usaha mampu mengelola biaya dan pendapatan dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan yang signifikan. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi desa. Sehingga, BUMDes Mitra Usaha tidak hanya mampu menutupi biaya operasional dan beban lainnya, tetapi juga menghasilkan surplus yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha atau peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Yulianartati, 2021).

Tabel 1. 4 Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

No.	**Jenis Usaha**
1.	Pujasera / Warung Lapangan (Warlap)
2.	Tempat Pengelolahan Sampah Terpadu (TPST)
3.	Kantin Perusahaan
4.	Perikanan

Sumber: Dokumen BUMDes Mitra Usaha 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa BUMDes Mitra Usaha memiliki 4 unit usaha meliputi Pujasera / Warung Lapangan (Warlap), Tempat Pengelolahan Sampah Terpadu (TPST), Kantin Perusahaan, dan Perikanan. Unit-unit tersebut dijelaskan dalam rangkaian kegiatan yang membentuk sistem kerja BUMDes Mitra Usaha, sebagai berikut:

1. Pujasera (Warung Lapangan)

Pertama yaitu unit usaha Pujasera / Warung Lapangan (Warlap) yang dulunya merupakan pusat jajanan dirubah menjadi konsep warung atau café, pengelola masih mempertahankan pusat jajanan dengan tetap menyewakan kios untuk warga sekitar. Dari semula bentuk pusat jajanan yang bekerja sama dengan berbagai pihak yang berorientasi saling menguntungkan, diantaranya dilakukan dengan masyarakat sekitar dan diutamakan warga desa Sidorejo yang berminta menyewa kios di Pujasera Desa untuk meningkatkan usahanya.

Unit usaha ini memiliki dua fungsi yaitu Pujasera di siang hari dan café di sore sampai malam hari. Pada sore sampai malam, terdapat penampilan *Live Music* yang merupakan upaya pengelola untuk menarik pengunjung dari berbagai kalangan. Pada tahun 2024, hasil penjualan harian Warung Lapangan mencapai Rp 63.612.000,00 dengan laba bersih senilai Rp 10.454.000,00 yang membuktikan bahwa unit usaha tersebut mampu menjalankan usahanya dengan efisian dan menguntungkan.

2. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)

Unit usaha kedua yaitu Tempat Pengelolahan Sampah Terpadu (TPST) yang memiliki modal awal dari serah terima pengelolaan TPST Desa Sidorejo dengan besaran tarif pembayaran Rp 20.000 per-Kartu Keluarga atau rumah, sementara untuk Perusahaan sebesar Rp 500.000 sampai Rp 2.000.000 per bulan. Unit usaha ini memiliki potensi untuk dikembangkan dan dikelola dengan lebih baik, hal tersebut dikarenakan

bagaimanapun potensi ekonomi dari sampah yang muncul dari Rumah tangga atau industry ringan memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

Unit usaha Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) mengalami peningkatan pendapatan, pada tahun 2023 pemasukkan TPST sejumlah Rp 9.500.000,00 sedang pada tahun 2024 pendapatan TPST mencapai angka Rp 23.000.000,00 tanpa ada pengeluaran.

3. Kantin Perusahaan

Unit Usaha ketiga yaitu Kantin Perusahaan, BUMDes Mitra Usaha bekerja sama dengan Perusahaan di wilayah Desa Sidorejo untuk dapat mengelola kantin di Perusahaan. Meskipun laba yang diperoleh dari unit usaha ini tidak sebesar 2 unit usaha sebelumnya, namun terdapat kenaikan disetiap tahunnya dalam perolehan keuntungan dari unit usaha kantin Perusahaan.Pendapatan unit usaha kantin Perusahaan pada tahun 2023 adalah Rp 300.000,00, namun pada tahun selanjutnya di tahun 2024 mencapai angka Rp 2.960.000,00 yang menunjukkan terdapat kegiatan usaha yang baik sehingga terdapat peningkatan pemasukan dari unit usaha kantin Perusahaan.

Selain unit-unit usaha tersebut, BUMDes juga mengelola lapangan yang terletak di samping Pujasera/Warung Lapangan. Penyewaan lapangan sering digunakan untuk penyelenggaraan pasar malam yang terdiri dari berbagai stand bazar yang menyediakan berbagai produk dan layanan, termasuk wahana permainan yang menarik pengunjung. Penyewaan lapangan biasanya juga di lakukan oleh masyarakat desa Sidorejo sendiri untuk keperluan acara seperti pernikahan, menggelar pertunjukan wayang, dan berbagai acara budaya lainnya.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan strategis sebagai agen pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari kinerja BUMDes Mitra Usaha yang secara konsisten memberikan kontribusi finansial yang nyata terhadap peningkatan PAD di Desa Sidorejo. Pada tahun 2023, BUMDes Mitra Usaha berhasil menyumbangkan pendapatan sebesar Rp 13.000.000,00, yang menunjukkan kapasitas BUMDes dalam mengelola sumber daya lokal secara optimal untuk mendukung pembangunan desa. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar Rp 11.000.000,00, angka tersebut tetap mencerminkan peran penting BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga dan penguatan struktur ekonomi lokal. Namun terlepas dari kontribusi positif BUMDes Mitra Usaha terhadap PAD Desa Sidorejo, BUMDes masih belum optimal karena pemberdayaan masyarakat di dalamnya tidak berjalan selaras dengan unit-unit usahanya.

Gambar 1. 2 Grafik Angka Pengangguran di Usia Produktif Desa Sidorejo

Sumber: Laporan Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel) Desa Sidorejo

Berdasarkan grafik di atas, dapat diamati adanya tren kenaikan angka pengangguran pada kelompok usia produktif dari tahun ke tahun tanpa adanya penurunan. Pada tahun 2021, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 585 orang, meningkat menjadi 605 orang pada tahun 2022, kemudian 625 orang pada tahun 2023, dan mengalami lonjakan signifikan mencapai 6.019 orang pada tahun 2024. Data ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan tajam pada tahun terakhir, yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penanganan pengangguran di usia produktif.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Terdapat empat hal pokok yang dijelaskan Mardikanto dan Subianto (Mardikanto, 2012) dalam bukunya, bahwa Bina kelembagaan yang dilakukan BUMDes dengan melakukan pengembangan usaha dan pembaruan untuk unit usaha yang mendorong masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan unit usaha. Bina usaha dengan dari pengembangan usaha yang memberikan banyak manfaat bagi anggota BUMDes Mitra Usaha maupun warga sekitar. Dalam Bina Lingkungan, BUMDes membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki usaha untuk mengembangkan dan memperbesar skala bisnis mereka sehingga dapat memperbaiki lingkungan fisik yang banyak terjadi karena kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Keempat, bina manusia yang dijalankan oleh BUMDes dengan memberikan lapangan kerja bagi warga sekitar dengan dibukanya berbagai unit usaha untuk dapat dikembangkan oleh warga.

Peneliti menemukan dari fenomena BUMDes Mitra Usaha Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo bahwa pemerintah dapat membantu masyarakat desa dengan membentuk BUMDes. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat dicapai melalui pengembangan unit usaha BUMDes yang sudah ada. Karena itu, penelitian yang lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Sidorejo sangat diperlukan. Mengacu pada hal tersebut, penulis memilih untuk menetapka judul penlitian ini **"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo"**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada uraian latar belakang dan data yang dikumpulkan di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi dan analisis terkait pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

   Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman dan pengalaman dalam menganalisis

Permasalahan ini dikaji berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari penulis, baik dari literatur maupun selama masa perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur, lalu dianalisis dengan membandingkannya terhadap kondisi yang ada di lapangan.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran " Jawa Timur

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan dan memberikan kontribusi sebagai landasan ide bagi penulis atau peneliti lain yang ingin melakukan studi sejenis di masa mendatang.

c. Bagi Pemerintahan desa Sidorejo, Krian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk diskusi berkelanjutan mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi desa dan pemerintah desa, sehingga pemberdayaan yang berhasil dapat meningkatkan perekonomian desa.